

PERANAN MAYOR JENDERAL SUDARSONO DALAM PERISTIWA 3 JULI 1946 DI INDONESIA

Syamsul Setiyawan, Syaiful M, Wakidi.

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail:syamsul.setiyawan@gmail.com

Hp. 085269940866

The purpose of this research was to find out the efforts of General Major Sudarsono as the action leader on July, 3rd 1946 incident in Indonesia. The method that used is historical method. Data collecting techniques used were literature technique and Documentation, While to analyze the data used qualitative data analysis. Based on the result of this research the role of General Major Sudarsono can be seen in planning the idea, effort or activity, and the responsibility of his effort who worked hard to steal the central figure in the governance such as Prime Minister Syahrir. This is cause of July, 3rd 1946 incident in Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pemimpin gerakan dalam peristiwa 3 Juli 1946 di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peranan Mayor Jenderal Sudarsono dapat dilihat dalam bentuk penyusunan ide, usaha atau aktivitasnya, dan tanggung jawab atas usahanya yakni berusaha menculik tokoh sentral dalam pemerintahan yakni Perdana Menteri Syahrir. Inilah penyebab terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 di Indonesia.

Kata kunci: indonesia, pemimpin gerakan, penculikan

PENDAHULUAN

Perubahan suatu negara untuk menjadi lebih baik dari aspek kehidupan merupakan cita-cita dan sekaligus harapan bagi seluruh rakyat yang bernaung di dalamnya. Untuk dapat mewujudkan cita-cita itu maka seluruh komponen yang ada harus bekerjasama dalam satu komando yang biasanya diperankan oleh pemerintah. Namun tidak jarang dalam merumuskan strategi perjuangan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan strategi yang dipakai oleh kelompok yang masih bagian dari negara tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan masa depan negara harus tegas mengambil sikap untuk menentukan jalan terbaik bagi masa depan negerinya.

Dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari penjajah mulai dilaksanakan oleh rakyat Indonesia guna merebut kekuasaan dan menegaskan kedaulatan negara proklamasi. Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegaskan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh senjata sebagai alat perjuangan apabila suatu saat terjadi serangan dari pihak luar yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Tepatnya pada tahun 1946, ketika negara Indonesia belum genap berusia satu tahun ketika krisis politik yang hebat melanda negeri ini. Di dalam tubuh para pemimpin Indonesia sendiri ternyata ada masalah besar. Kepentingan kelompok, ketidaksabaran dalam menjalankan situasi, hilangnya rasa kawan sebangsa, serta adanya petualang politik yang tidak puas menggoyahkan pemerintahan Indonesia yang baru berjalan.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan tersebut terdapat perbedaan dalam menentukan strategi perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik

Indonesia. Dalam hal ini strategi pemerintah adalah kompromi dengan Belanda melalui perundingan dan anjuran pendirian partai-partai politik untuk menunjukkan adanya demokrasi. Dua kebijakan ini dirumuskan dalam Maklumat Pemerintah pada tanggal 1 dan 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Sikap protes serta kritikan terhadap pemerintah berawal dari keluarnya kebijakan pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari Serikat Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai pemerintah (Marwati Joened Posponegoro, Nugroho Notosusanto, 1990 : 128).

Sikap pemerintah itu selain kurang disetujui Angkatan Perang, juga mendapat tantangan dari golongan tertentu. Tokoh utama dari golongan ini adalah Tan Malaka. Mereka beranggapan bahwa diplomasi tidak efektif karena memberikan peluang bangsa lain kembali menguasai Indonesia terutama Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Para politisi Indonesia terpecah ke dalam dua posisi. Pertama, mereka yang mendukung langkah diplomasi dengan Belanda, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin. Di seberangnya, ada kelompok lain memilih opsi militer untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Tokoh-tokohnya tak kalah berpengaruh diantaranya : Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, dan Chaerul Saleh. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga menunjukkan dukungannya kepada kelompok kedua ini (M. Yuanda Zara, 2009 : 2).

Kekecewaan pihak oposisi memuncak setelah terpilihnya Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri yang dianggap telah gagal mengatasi krisis yang melanda Indonesia dan mengangkat menteri dari pihaknya yang menguasai posisi kunci dalam pemerintahan. Pihak oposisi mengharapkan Tan Malaka yang lebih bersikap Radikal sebagai formatur pemerintahan (Tashadi. 1991 : 153).

Merasa keinginannya tidak terpenuhi para pemuda membentuk organisasi bernama Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka dan melanjutkan oposisinya terhadap pemerintah. Tan Malaka menekankan perlunya Persatuan Perjuangan dari semua orang dan semua aliran untuk melaksanakan program umum yang berintikan tuntutan perjuangan kemerdekaan Indonesia 100% dan pengusiran tentara asing dari Indonesia.

Persatuan Perjuangan berusaha mencari bantuan dari pihak militer dalam upaya pergantian kabinet. Salah satu tokoh militer yang berhasil dipengaruhi ialah Mayor Jenderal Sudarsono yang merupakan seorang perwira yang menjabat sebagai Panglima Divisi III yang membawahi Kedu, Pekalongan, dan Yogyakarta. Keinginan Mayor Jenderal Sudarsono bergabung dengan oposisi karena permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui *de facto* atas Jawa dan Sumatera dinilai amat merugikan Indonesia. Perjuangan dan pengorbanan rakyat seolah-olah tidak dipertimbangkan pemerintah.

Situasi politik yang terjadi pada saat itu bisa dikatakan sulit, hal ini dikarenakan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan sulit itu pemerintah menahan para pemimpin Persatuan Perjuangan yang salah satunya Tan Malaka atas dasar pertimbangan demi menghindarkan kekacauan dalam masyarakat. Upaya penahanan ini pun tidak disetujui oleh militer karena garis perjuangan Persatuan Perjuangan sejalan dengan militer yang tanpa kompromi.

Kecewaan militer semakin besar kepada pemerintah dikala dalam organisasi kemiliteran pemerintah terlalu ikut campur. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksetujuan militer atas Pepolit (Pendirian Staf Pendidikan Politik Tentara), organisasi pertahanan, pengangkatan komandan-komandan dan divisi merupakan faktor tambahan atas berlangsungnya pertentangan. Hal ini menimbulkan gagasan dari salah satu perwira militer yakni Mayor Jenderal Sudarsono untuk menjatuhkan pemerintahan secara paksa dengan menculik Perdana Menteri Syahrir (G. Moedjanto. 1988 : 167).

Mayor Jenderal Sudarsono yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan lalu menyusun gagasan dan usaha untuk merubah kabinet dengan menculik Perdana Menteri Syahrir. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian perintah kepada bawahannya Mayor A.K. Yusuf untuk melakukan penculikan. Atas usahanya ini Sudarsono bertanggung jawab dengan menghadap Presiden Sukarno.

Perpecahan semakin meruncing dan berujung pada Peristiwa 3 Juli 1946. Pada 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono dan beberapa tokoh militer “memaksa” Sukarno menuruti kehendak mereka. Dalam batasan tertentu kejadian ini dianggap sebagai kudeta (M. Yuanda Zara. 2009 : 1).

Dalam peristiwa ini dapat dijadikan gambaran bahwa dalam semangat mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Keinginan mengatur bangsa tanpa ada pengaruh bangsa asing sangat besar, hal itu ditunjukkan dengan penculikan pemimpin negara oleh bangsanya sendiri pada peristiwa 3 Juli 1946.

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian, metode merupakan faktor yang penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan penelitian.

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahannya.

Menurut Joko Subagyo metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (Joko Subagyo, 2006 : 1).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah kerja yang digunakan peneliti secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Oleh karenanya, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam upaya memecahkan suatu masalah dan turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa- peristiwa yang terjadi pada masa lalu.

Penelitian historis adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta dari sumber-sumber yang ada, kemudian dievaluasi secara prosedural agar terungkap akan gambaran kondisi atau keadaan pada masa lampau dan diketahui pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mensintesis bukti- bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian historis lebih tergantung kepada data yang diobservasi oleh peneliti sendiri, data yang baik akan dihasilkan oleh kerja yang cermat yang menganalisis keotentikan, ketepatan, dan pentingnya sumber-sumbernya. "dalam penelitian historis"

tergantung kepada dua macam data, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian- kejadian yang dituliskan. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah terlepas dari kejadian aslinya. Diantara kedua sumber itu, sumber primer dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama, dan diberikan prioritas dalam pengumpulan data (Sumadi Suryabrata, 2000 :16-17).

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian (Abddurrahmat fathoni, 2006 : 24). Pendapat Sugiyono bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antar satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut (Husein Umar, 2008 : 47).

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah. Di dalam satu variabel terdapat satu atau lebih gejala yang mungkin pula terdiri dari berbagai aspek atau unsur sebagai bagian yang tidak terpisahkan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994 : 49).

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam penelitian yang menjadi pusat perhatian dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal.

Teknik dalam pengumpulan data ini diartikan sebagai metode atau cara peneliti adalah mengumpulkan data-data atau sumber-sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tema penelitian ini, untuk menguji bahwa hipotesis diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada. Data-data tersebut dikumpulkan

dengan teknik tertentu yang disebut dengan teknik pengumpulan data, dengan demikian peneliti perlu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan sumber-sumber bahan antara lain melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi.

Menurut Joko Subagyo teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo, 2006 : 109).

Teknik dokumentasi yaitu, suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 158).

Sementara itu teknik dokumentasi juga dapat diartikan sebagai mencari data penelitian yang bersumber dari pada tulisan, penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006 : Halaman 158).

Langkah operasional yang dilakukan penulis dalam proses pengumpulan data adalah dengan mencari sumber baik primer atau sekunder dari buku-buku yang ada di perpustakaan baik di daerah ataupun yang ada di universitas sebagai bahan baku penunjang pembuktian kebenaran akan data yang ditulis, penulis juga menggunakan internet dalam proses ini sebagai bahan penunjang pembuktian akan kebenaran data yang ditulis.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk laporan dan karangan sejarawan, sehingga memerlukan

pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian dan mendapatkan kesimpulan.

Adapun definisi kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau memuatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (Joko Subagyo, 2006 : 106).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Keadaan Politik Indonesia Pada Awal Kemerdekaan.

Setelah Proklamasi dibacakan muncul reaksi keras dari Tentara Jepang untuk menghalangi penyebaran berita agar tidak meluas. Namun usaha mereka tidak berhasil, malahan penyebaran lebih banyak lagi terjadi. Demikian besar kegiatan dan kemauan serta keyakinan rakyat membantu penyiaran berita kemerdekaan akhirnya berita kemerdekaan itu sampai di Kantor Berita Domei di Jakarta, maka penyiaran Proklamasi itu dapat disiarkan ke seluruh Indonesia dan dunia melalui udara, kemudian barulah diketahui oleh Jepang di Domei dan di kantor-kantor Jepang lainnya bahwa Proklamasi sudah melayang di udara dengan cepat pucuk pimpinan militer Jepang di Jakarta mengadakan tindakan dengan memerintahkan kepada Domei untuk menarik berita itu dengan keterangan bahwa berita itu keliru.

Setelah Proklamasi terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh senjata. Dalam rangka ini di Jakarta para pemuda yang dipelopori oleh Komite van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengerahkan massa pada suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, agar

para pemimpin RI dapat berbicara dihadapan mereka. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 cara yaitu: persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana pada presiden (Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1990 : 101).

2. Upaya Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

a. Kedatangan Sekutu ke Indonesia.

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, ia harus melepaskan kembali daerah pendudukannya. Ini berarti daerah koloni yang semula direbut dari bangsa Barat yang tergabung dalam blok Sekutu harus dikembalikan. Pihak Belanda sudah sejak bulan April 1944 mempersiapkan pendudukan kembali Indonesia. Sejak bulan itu pemerintah Belanda dan Inggris telah menyelenggarakan perundingan di London dan Kandy. Perundingan itu menghasilkan *Civil Affairs Agreement* yang isinya pengaturan penyerahan kembali dari pihak Inggris kepada pihak Belanda khusus yang menyangkut Sumatra (daerah Indonesia yang dibawahkan oleh *South East Asia Command*, SEAC). Menurut ketentuan tersebut pada fase pertama Panglima Tentara Sekutu akan berwenang menyelenggarakan operasi militer serta memulihkan *law and order* (keamanan dan ketertiban). Pada fase kedua, pejabat-pejabat NICA akan mengambil akan mengambil tanggung jawab tersebut dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu (G. Moedjanto, 1988 : 96).

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat itu disambut netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Serikat atau Inggris itu membawa orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia-Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi minimal curiga dan maksimal bermusuhan. Situasi keamanan dengan cepat merosot menjadi

buruk sekali, sejak NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang dan menyebabkan terjadi kerusuhan dengan menggunakan provokasi-provokasi senjata di Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan dengan tegas memperingatkan pasukan Serikat akan tugas-tugas mereka yang sesungguhnya dan bahwa mereka tidak berhak mencampuri persoalan politik. Persoalan politik adalah semata-mata urusan pihak Indonesia dan Belanda. tugas yang dihadapi oleh pasukan Indonesia dan Serikat adalah sama yakni menegakkan keamanan dan ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan disebabkan gerombolan NICA. Dan perbuatan itu ditentang oleh rakyat Indonesia.

b. Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Jogjakarta

Tanggal 3 Januari 1946, karena menyadari situasi gawat darurat, Soekarno menggelar rapat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Hanya Yoga yang dirasa aman dari gangguan Belanda. Fasilitas di kota ini pun cukup memadai untuk menjadi ibu kota sementara

Dengan bertambah gentingnya situasi di Jakarta, dan semakin terancamnya jiwa para pemimpin Republik Indonesia maka pada akhir sidang tanggal 3 Januari 1946 diputuskan untuk memindah pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dengan organisasi *rapid an* penuh rahasia, pada tanggal 4 Januari 1946 Ibukota Pemerintah Republik Indonesia untuk sementara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejak itu kota Yogyakarta menjadi Ibukota perjuangan Republik Indonesia selama empat tahun (1946-1949).

Kota Yogyakarta dipilih sebagai tempat perpindahan Ibukota dikarenakan Yogyakarta adalah tempat yang aman, Yogyakarta juga tidak jauh dari Jakarta. Dengan demikian kota Yogyakarta menjadi ibukota sementara, lagi pula

menjadi pusat revolusi yang menjiwai negara kita. Selanjutnya waktu tahun 1946-1948 praktis seluruh daerah RI dikuasai oleh tentara Belanda maka Yogyakarta bertahan sebagai ibukota yang bebas dari tentara Belanda

3. Timbulnya Perselisihan dan Jatuhnya Kabinet

a. Lahirnya Oposisi Bernama Persatuan Perjuangan.

Untuk mengimbangi kekuatan politik pemerintah serta kekuatan Sekutu yang datang maka kelompok yang memilih jalur perjuangan melalui aksi massa membentuk suatu organisasi yang nantinya organisasi ini dapat mengkoordinir semua partai, tentara, laskar dan badan yang pecah belah untuk menentang diplomasinya dengan Belanda. Lalu lahirlah Persatuan Perjuangan yang dibentuk oleh Tan Malaka.

....., dasarnya persatuan dalam menyelesaikan revolusi ini ialah PERJUANGAN untuk menghadapi MUSUH BERSAMA, sampai tercapai KEMERDEKAAN 100%, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, jadi bukannya PERSATUAN untuk BERKOMPROMI, yang berarti berkhianat kepada KEMERDEKAAN 100% menurut Proklamasi 17 Agustus 1945 Maka PERSATUAN PERJUANGAN itulah nama yang saya anggap paling tepat (A.H Nasution. 1977 : 70).

Pada tanggal 3-5 Januari 1946 berlangsunglah Kongres Persatuan Perjuangan yang pertama di Purwokerto, yang dihadiri oleh 138 organisasi rakyat. Banyaknya pihak yang simpatik akan organisasi ini memberi apresiasi dan berharap besar akan kemerdekaan yang tercapai 100%. Salah satunya adalah Panglima Besar Sudirman yang datang dalam kongres Persatuan Perjuangan sebagai wakil TKR. Dukungannya atas Persatuan Perjuangan bahkan ditampilkannya secara terbuka lewat pidato legendarisnya di podium. Dalam

salah satu pidatonya dengan semangat membara ia berkata: “lebih baik kita diatom daripada merdeka kurang dari 100%.”

b. Perselisihan Pemerintah, Militer dan Oposisi (Persatuan Perjuangan).

Dalam memilih cara menghadapi NICA makin timbul keretakan dalam persatuan rakyat Indonesia yakni antara yang memilih menggunakan jalur “aksi massa” dan “berdiplomasi”, antara yang “konsekwen kepada Proklamasi” dan yang “berkompromi”. Pihak pertama dihubungkan dengan Tan Malaka, Sukarni, Khaerul Saleh, Adam Malik, dkk. Sedang pihak kedua Sukarno, Hatta, Sjahrir, Amir Syarifudin, dkk. Pihak pertama sebagai oposisi berhasil menghimpun 141 organisasi rakyat, sedangkan pihak kedua Sukarno-Hatta dikalangan rakyat tetap dapat teguh memerintah, walaupun dalam hal kepartaian hanya bersandar kepada golongan yang kemudian disebut “sayap kiri”. Yakni Partai Sosialis, Partai komunis, SOBSI dan lain-lainnya (A.H Nasution. 1977 : 66).

Sikap tidak mau menempuh jalur diplomasi bersumber dari beberapa pandangan. Salah satunya adalah pandangan yang dipengaruhi sekali oleh pihak Jepang yang mempersiapkan bangsa dan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan terhadap Sekutu sebagai kelanjutan atau bagian Perang Pasifik. Pengaruh ini ditanamkan selama Jepang di Indonesia dengan sikap anti-Barat, anti-Sekutu, dengan semboyan-semboyan Amerika kita setrika dan Inggris kita linggis.

Pengalaman lain seperti di Ambarawa-Semarang dan pasukan BKR/TKR daerah Banyumas di bawah pimpinan Jenderal Sudirman yang berhasil merebut persenjataan dari Jepang dan dengan demikian perlengkapan perang sudah agak memadai, maka pandangan dan sikap tidak mau berunding dengan Sekutu atau sikap tidak mau menempuh jalur diplomasi

mempengaruhi sekali sikap Jenderal Sudirman yang pada waktu itu telah diangkat menjadi Panglima Besar pada tanggal 18 Desember 1945. Sikap tidak mau berunding itu juga ada yang bersumber dari perasaan dan sikap akan ditindak oleh Sekutu sebagai kolaborator Jepang atau penjahat perang.

Dipihak oposisi berusaha memperkuat benteng pertahanan dengan membentuk suatu organisasi massa bernama "*Persatuan Perjuangan*" yang bertujuan untuk memperkuat diri sebagai pihak oposisi dengan pemerintah. Organisasi yang baru muncul ke muka setelah mengadakan kongres pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946 di Solo. Dengan dihadiri oleh wakil-wakil 141 organisasi Politik, Ekonomi, Sosial dan Ketentaraan.

c. Kabinet Sjahrir I Jatuh dan Upaya Pengambilalihan Kekuasaan.

Popularitas *Persatuan Perjuangan* makin bertambah kuat berkat kepribadian Tan Malaka dan strategi perjuangannya yang disusun dan dilaksanakan secara konsekwen, karena hal inilah membuat posisi pemerintah kurang aman dalam mengatur pemerintahan. Tidak kalah pentingnya juga adalah kesulitan yang disebabkan oleh kegagalan dalam mengatasi masalah dalam pemerintahan membuat kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah berkurang.

Kondisi politik pada saat itu sangat kacau, pertempuran terus terjadi antara Sekutu dengan rakyat. Hal ini disebabkan karena rakyat tidak mau kembali menderita oleh pihak asing yang ingin menguasai kembali Indonesia. Sjahrir, Hatta dan Amir pada hari-hari itu terus-menerus membuat seruan melalui radio, yang mendesak rakyat supaya tetap tenang dan taat, dan menahan diri dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap minoritas dan Sekutu tetapi tidak berhasil (Ben Anderson, 1967 : 328).

Timbulnya kekacauan di negeri ini mendapat perhatian serius dari Badan Pekerja. Sesuai dengan kedudukannya dan peranannya sebagai perwakilan rakyat sementara selalu meminta anjuran-anjuran pikiran dan usul-usul. Sebagai perwakilan rakyat, Badan Pekerja mendesak, mengusulkan, dan mengontrol agar pemerintah agar benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan untuk memperkokoh Pemerintah Republik Indonesia, maka Badan Pekerja dalam pengumumannya No. 26 tanggal 22 Januari 1946 menganjurkan kepada masyarakat untuk mengadakan persatuan. Dengan adanya golongan yang akan mencoba mengadakan perpecahan antara pemerintah dengan rakyat, maka Badan Pekerja berusaha mengangani agar tetap bersatu.

Berdasarkan Resolusi II, Perdana Menteri Sjahrir menyampaikan surat kepada presiden pada tanggal 23 Februari 1946 untuk mengundurkan diri, yaitu sebelum rapat KNIP lengkap tanggal 28 Februari 1946 dan presiden menerima pengunduran diri pada tanggal 28 Februari 1946 saat rapat KNIP akan dimulai.

4. Peristiwa 3 Juli 1946.

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh pihak oposisi *Persatuan Perjuangan* terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II di Indonesia. Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura.

Pada perayaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. di Alun-alun Utara Yogyakarta pada 25 Juni 1946 telah memicu ketidakpuasan pada sejumlah

pihak di luar pemerintah. Pidato Wakil Presiden Muhammad Hatta tentang permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui *de facto* atas Jawa dan Sumatera dinilai amat merugikan Indonesia. Perjuangan rakyat seolah-olah tidak dipertimbangkan oleh pemerintah (M. Yuanda Zara. 2009 : 170).

Rasa kecewa terhadap pemerintah yang gagal menangani masalah politik, maka pihak oposisi merencanakan pergantian kabinet. Pelopornya adalah Mayor Jenderal Sudarsono dengan melakukan penculikan terhadap PM. Sjahrir guna segera tercapainya pergantian kabinet baru. Pada tanggal 27 Maret 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan beberapa anggota kabinet diculik oleh orang-orang dari pihak oposisi.

5. Munculnya Mayor Jenderal Sudarsono dan Usaha-usahanya Dalam Peristiwa 3 Juli 1946.

a. Penyusun Konsep

Penangkapan Tan Malaka dan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan menimbulkan reaksi keras dari para pendukungnya. Sementara itu, mereka mendengar kinerja pemerintah yang menggunakan jalur diplomasi tidak berhasil. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa semakin menurun, karena masalah dalam politik di Indonesia tidak kunjung selesai dalam menangani campur tangan bangsa lain dalam mengisi kemerdekaan, ada alasan lain yang tidak kalah penting untuk menjatuhkan Sjahrir.

Sejak saat itu perpecahan antara pemerintah dengan pihak oposisi yang dahulunya berwadahkan Persatuan Perjuangan terus meningkat. Pada tanggal 26 Juni 1946, Orang-orang terkemuka dari pihak oposisi berkumpul di rumah Budhyarto Martoatmojo, Penasihat Panglima Divisi III, di Bicaró Yogyakarta, dimana isi pidato Wakil Presiden menjadi pokok pembicaraan. Tokoh-tokoh yang

hadir diantaranya Sutarjo, Chaerul Saleh, Dokter Buntaran, Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, Jenderal Marjohan, Jenderal Sudarsono, dan Mayor A.K Yusuf. Setelah pertemuan tersebut usai dan tidak menemukan solusi pemecahan masalah yang tepat, Sudarsono pulang kerumahnya ditemani oleh Yusuf.

Di rumah Sudarsono tersebut sang jenderal berbincang dengan Yusuf mengenai pengkhianatan pemerintah Sjahrir terhadap Indonesia merdeka dan mendesak panglimanya supaya mengijinkannya untuk “Menyingkirkan” Syahrir, dengan perkiraan bahwa dengan digesernya Perdana Menteri itu maka Sukarno dan Sudirman akan mengambil kekuasaan sepenuhnya dan mengembalikan kebijaksanaan pemerintah menghadapi Belanda (Ben Anderson 1967 : 418).

Pemikiran lain dari Sudarsono tentang penculikan terhadap Syahrir dikarenakan dia ingin membalas tindakan pemerintah yang telah membuat Panglima Besar Sudirman gelisah karena penangkapan tokoh Persatuan Perjuangan. Selain itu, sebagai komandan sekaligus Panglima Divisi, Sudarsono merasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya berhak memerintahkan penangkapan terhadap seseorang pengkhianat dengan tidak memandang pangkat atau kedudukannya.

Di rumah Sudarsono inilah terjadi perbincangan antara Sudarsono dan Yusuf membuahakan ide untuk menculik Sjahrir. Yusuf meminta kepada panglimanya supaya mengijinkannya untuk bertindak.. Sudarsono yang merasa mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan pada saat itu lalu memberikan restu kepada anak buahnya untuk menjalankan aksinya. Sudarsono meyakini tindakan balasan ini diperbolehkan oleh Sudirman yang sedang bingung karena penangkapan atas tokoh Persatuan Perjuangan sebelumnya. Lewat sebuah mandat ia memberi restu kepada A.K Yusuf, Sudarsono memberi kuasa

kepada Yusuf untuk menangkap Sjahrir, Dr. Sudarsono dan Abdulmajid.

Berita penculikan Sjahrir kemudian disampaikan kepada tokoh oposisi yang ditahan di Tawangmangu melalui Jusuf, Iwa dan Yamin. Reaksi mereka bercampur baur beberapa merasa senang ada juga yang cemas tentang tindakan yang dianggap ceroboh yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak sadar akan apa yang dilakukan pemerintah, mereka terang mengharapkan terbentuknya dengan cepat suatu kabinet baru. Mungkin seperti Kabinet Bucho tetapi dibawah pimpinan Sukarno.

Usaha-usaha perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 3 Juli 1946 menjelang dini hari. Jenderal Sudarsono bersama M. Yamin pergi ke penjara Wirogunan. Kepada kepala penjara mereka mengaku diperintah oleh Panglima Besar untuk memindahkan 14 tahanan ke Resimen Suharto di Wioro. Mereka diangkut oleh Mayor A.K. Yusuf ke Wioro, kecuali Moh. Saleh yang turut dengan Sudarsono. Dalam suatu ruangan atas permintaan Sudarsono dibuatlah 4 helai rencana maklumat oleh M. Yamin, Subardjo, Budhyarto, dan Chaerul Saleh.

Melihat Susunannya, kabinet bentukan Subarjo-Yamin mirip kabinet Sukarno yang ditambah dengan wakil grup oposisi terhadap Kabinet Sjahrir. Melihat dari nama-namanya Nampak kalau penyusunan terlalu tergesa-gesa dan tidak mencerminkan ide-ide Tan Malaka beserta kemungkinan pelaksanaan Program Minimum.

b. Pertanggung jawaban Sudarsono dalam peristiwa 3 Juli 1946.

Pemerintah tidak tinggal diam dengan penculikan ini, dengan Dekrit Istimewa Sukarno mengambil alih kedudukan Sjahrir sebagai ketua dewan pertahanan. Berita penculikan tidak diumumkan, sementara usaha-usaha keras dilakukan untuk mencari perdana menteri yang hilang dan merundingkan pengembaliannya. Sementara pemerintah

meningkatkan usaha mencari Sjahrir dan mencoba menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penculikan itu.

Setelah langkah terakhir ini, maka berita tentang penculikan Sjahrir ini tidak dapat ditutup-tutupi terhadap masyarakat umum. Sesuai dengan itu pada 29 Juni Sukarno mengumumkan "Berhoeboeng dengan kedjadian dalam negeri jang membahayakan keselamatan negara dan perdjoeangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Repoeblik Indonesia dengan persetoedjoean kabinet dalam sidangja tanggal 28 Djoeni 1946, mengambil kekoeasaan pemerintahan sepenoeh-penoehnja oentoeik sementara waktoe, sampai kembalinja keadaan biasa jang memoengkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi berkedja sebagaimana mestinja...." (Ben Anderson, 1967 : 422).

Dengan pernyataan umum Presiden, sistem kabinet parlementer diganti oleh suatu bentuk baru dari pemerintah presidensil. Pada hari itu pemerintah akhirnya mengakui secara terbuka bahwa Sjahrir dan berbagai pimpinan politik diculik. Tindakan tersebut dianggap sebagai upaya membantu Belanda dengan melemahkan kesatuan negara. Dinyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan keras dan menyerukan kepada seluruh warga negara supaya berdiri mendukung pemerintah.

Sudarsono menjadi sasaran berikutnya dikarenakan ialah yang menjadi otak dalam penculikan Syahrir, seperti pernyataan A.H. Nasution yang dikutip oleh M. Yuanda Zara di bawah ini:

Keyakinan tentang terlibatnya Sudarsono dan bawahannya Abdul Kadir Yusuf didapatkan dari testimoni mereka sendiri. Menurut A.H. Nasution Keduanya mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sebagai komandan sekaligus panglima divisi, Sudarsono merasa memilik wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya berhak memerintahkan

penangkapan terhadap seorang penghianat dengan tidak memandang pangkat atau kedudukannya (M. Yuanda Zara. 2009. 190).

Atas usaha yang dilakukan maka Panglima Divisi III diperkenankan menghadap presiden sendirian, tetapi tidak boleh membawa senjata. Atas pertanyaan presiden ia mengatakan atas perintah Panglima Besar ia akan menyerahkan 4 helai maklumat untuk ditanda tangani.

Usulan Jenderal Sudarsono tidak diterima baik oleh Sukarno, Sementara itu sebenarnya suasana di Istana sudah siap sedia menghadapi kedatangan Sudarsono. Istana memperketat penjagaan di, pengawal biasa diperkuat dengan Batalyon dari Malang, Pesindo, dan Polisi Istimewa. Dengan kondisi tersebut akhirnya Jenderal Sudarsono tidak dapat melakukan perlawanan dan berhasil ditahan.

Diantara para terdakwa yang diajukan ke muka sidang, tujuh orang diantaranya dinilai bersalah sehingga mendapat hukuman. Ketujuh orang yang dimaksud yaitu:

1. R.P. Sudarsono dijatuhi hukuman 4 tahun,
2. Muhammad Yamin dijatuhi hukuman 4 tahun,
3. Mr. Subarjo dijatuhi hukuman 3 tahun,
4. Iwa Kusuma Sumantri dijatuhi hukuman 3 tahun,

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

5. Mr. R. Sundoro Budhyarto Martoatmojo dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan,
6. Dokter R. Buntaran Martoatmojo dijatuhi hukuman 2 tahun,
7. R. Muhammad Saleh dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan (M. Yuanda Zara. 2009. 240).

SIMPULAN

Peranan Mayor Jenderal Sudarsono dalam pentas politik pada masa awal kemerdekaan 1945-1946 ialah menjadi aktor utama dalam usaha penculikan Syahrir diantaranya dapat dilihat dengan aktivitasnya sebagai penyusun konsep, yakni dengan berembuk bersama A.K Yusuf yang merencanakan penculikan terhadap Perdana Menteri agar pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan memberi kuasa kepada Yusuf untuk menculik Sjahrir dengan bekerjasama dengan tokoh militer lain bawahan Sudarsono.

Dengan penculikan yang dilakukan atas rencana Sudarsono ini, pemerintah merasa perlu mencari siapakah aktor utama yang harus bertanggungjawab atas penculikan yang terjadi terhadap perdana menteri, hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan dianggap pemerintah sebagai usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang berdaulat dan Sudarsono adalah nama yang dicari pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ben. Anderson, 1967. *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-*

20. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Yuanda Zara. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Nasution A.H, 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid IV*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: University Gadjah Mada.
- Notosusanto, Nugroho. Marwati Djoened Poesponegoro. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- S. Nasution. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tashadi, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.